

Research Article

Perkembangan dan Problematika Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Achmad Audi Pratama Jojang¹, Tasman Hamami²

1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, audiyoyang2@gmail.com
2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tasmanhamami61@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Received : October 5, 2024
Accepted : December 1, 2024

Revised : November 18, 2024
Available online : December 9, 2024

How to Cite: Audi, Achmad Audi Pratama Jojang, Tasman Hamami, Moh Luthfih Gonibala, and Farhan Moh Fahrurozi Bonde. n.d. "Perkembangan Dan Problematika Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. Accessed December 16, 2024. https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/1210.

Abstract: This article investigates the evolution of the Islamic religious education curriculum in Indonesia throughout history, describing the changes from the pre-independence period to the reform era. The documentation method is used by collecting data from various sources. Since the arrival of the Dutch in 1695, Islamic education continued, and the VOC encouraged the establishment of Islamic schools. The establishment of the Ministry of Religious Affairs in 1946 provided a significant impetus, while the New Order period saw curriculum changes in 1962, 1968, 1975, 1984, 1994, and the 1999 Supplement. The PAI curriculum reflects the evolution from a religious focus and memorization of texts to integration with general science. Despite progress, there are still challenges such as a lack of critical thinking, less active learning, and overly cognitive assessment. Deep reforms are needed to maintain the relevance of the curriculum to the needs of the times, maintain Islamic identity without sacrificing the essence of teachings, and improve the quality of Islamic religious education in the face of the development of science, technology, and moral crisis.

Keywords: Curriculum, Education, Problems

Abstrak: Artikel ini menyelidiki evolusi kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia sepanjang sejarah, menggambarkan perubahan dari masa prakemerdekaan hingga era reformasi. Metode dokumentasi digunakan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Sejak kedatangan Belanda pada 1695, pendidikan Islam tetap berlanjut, dan VOC mendorong pendirian

sekolah Islam. Pembentukan Kementerian Agama pada 1946 memberikan dorongan signifikan, sementara masa Orde Baru melihat perubahan kurikulum pada tahun 1962, 1968, 1975, 1984, 1994, dan Suplemen 1999. Kurikulum PAI mencerminkan evolusi dari fokus agama dan hafalan teks ke integrasi dengan ilmu pengetahuan umum. Meskipun ada kemajuan, masih ada tantangan seperti kurangnya pemikiran kritis, pembelajaran aktif yang kurang, dan penilaian yang terlalu kognitif. Reformasi mendalam diperlukan untuk menjaga relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman, mempertahankan identitas Islam tanpa mengorbankan esensi ajaran, dan meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan krisis moral.

Kata Kunci : Kurikulum, Pendidikan, Problematika

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang cepat telah menyebabkan percepatan yang sesuai dalam perkembangan kognitif anak-anak. Akibatnya, kurikulum di Indonesia telah mengalami banyak revisi agar selaras dengan pendidikan, kemajuan, teknologi, dan pertumbuhan siswa. Modifikasi yang diterapkan dalam kurikulum Indonesia dimaksudkan untuk menyesuaikan dan meningkatkan sistem pendidikan Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitasnya secara keseluruhan. Kurikulum memainkan peran penting dalam dunia pendidikan. Pemerintah telah membuat kemajuan dengan upaya untuk memperbaiki hal ini (Ritonga 2018).

Perkembangan kurikulum di Indonesia, dengan lika-likunya, menyebabkan para pemikir pendidikan berusaha merancang kurikulum yang dapat menjawab tantangan zaman, tidak terkecuali dengan kurikulum pendidikan agama Islam (Akhyar and Erihadiana 2021). Pendidikan Agama Islam memiliki posisi penting dalam sistem pendidikan di Indonesia seiring dengan mayoritas penduduknya yang menganut agama Islam Sejak masa kemerdekaan Indonesia, Pendidikan Agama Islam telah diintegrasikan ke dalam Kurikulum nasional sebagai bagian dari usaha untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan kurikulum Kurikulum pendidikan agama Islam sangatlah penting dalam mengarahkan anak-anak untuk memiliki nilai-nilai luhur. Kurikulum pendidikan agama Islam juga harus disesuaikan untuk mengatasi masalah pendidikan saat ini (Azizah 2022). Akibatnya, proses desain kurikulum memperhitungkan kesinambungan satu sama lain.

Dalam Mencapai kurikulum yang kompatibel mungkin agak menantang. Kenyataannya adalah bahwa keadaan pendidikan di Indonesia saat ini, yang sedang mengalami perubahan terus-menerus dalam desain kurikulum, membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan yang berlaku. Modifikasi ini telah berulang kali diterapkan oleh otoritas pendidikan terkemuka di Indonesia. Namun demikian, pertumbuhan kurikulum di Indonesia terganggu oleh berbagai tantangan, termasuk penurunan prestasi siswa dan kebutuhan akan peningkatan sarana dan prasarana (Setiawati 2022).

METODE PENELITIAN

Pembahasan tentang perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di

Indoensia merupakan kajian yang bernuansa sejarah, maka metode pengumpulan data pada artikel ini menggunakan metode dokumentasi sebagaimana yang digunakan dalam teknik pengumpulan data pada penelitian kepustakaan (library research). Metode dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda atau dokumen-dokumen seperti majalah, buku-buku, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto 1998).

Mengumpulkan sumber-sumber primer maupun sekunder yang berupa buku yang ada sangkut-pautnya dengan tema pembahasan pada artikel ini, adalah teknik yang digunakan peneliti untuk bertujuan agar mendapatkan data dan penjelasan mengenai pembahasan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam mencerminkan dinamika yang sering berkaitan dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya dalam dunia Islam. Ini adalah cerminan dari bagaimana masyarakat Muslim mencari cara untuk memahami dan menjalankan ajaran agama mereka seiring berjalannya waktu. Pembahasan tentang perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam akan membantu kita memahami perkembangan dari masa awal Islam hingga saat ini, termasuk bagaimana pendidikan agama Islam beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan budaya.

1. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pra Kemerdekaan

Selama masa praa-kemerdekaan, pendidikan Islam diberikan penekanan yang relatif kurang karena efek kolonialisme. Akibatnya, orang-orang dari bangsa ini dididik dengan tujuan melayani penjajah. Selama masa kolonial, semua jenis pendidikan terutama difokuskan pada mempromosikan dan memajukan kepentingan penjajah (Ali 2003).

Sejak setelah kedatangan Belanda di Indonesia pada tahun 1695 M, praktik pendidikan Islam di masjid, surau, langgar, dan pesantren awalnya tetap tidak berubah. Namun, sesuai dengan dokumen VOC, yang mengamanatkan keterlibatan VOC dalam perdagangan dan, jika perlu, perang di Indonesia, perhatian juga diberikan pada promosi Islam melalui pendirian sekolah (Nata 2003). Kurikulum pendidikan selama masa kolonial Belanda secara mencolok tercermin dalam lembaga-lembaga pendidikan yang membinanya. Misalnya, sistem pendidikan Islam yang dilakukan di pesantren berfokus pada pendidikan agama, khususnya kajian ilmu-ilmu agama. Kategorisasi pola pesantren yang menjadi topik utama diskusi ini dapat diklasifikasikan menjadi lima pola berbeda:

- 1) Konten yang ditawarkan di pesantren ini terdiri dari ajaran agama yang berasal dari literatur klasik. Mekanisme pengiriman yang digunakan adalah wetonan dan srogan, yang bertentangan dengan sistem tradisional. Mereka dievaluasi dan dinilai sesuai dengan literatur yang mereka konsumsi. Kursus umum tidak termasuk dalam kurikulum, dan sertifikat tidak dianggap signifikan untuk tujuan pekerjaan. Penekanannya hanya terletak pada studi mendalam tentang bahan-bahan keagamaan, sebagian besar melalui karya-karya klasik.

- 2) Pembelajaran dapat dilakukan melalui metode tradisional dan non-tradisional, yang mencakup keterampilan yang diajarkan dan aspek organisasi. Pada tahap tertentu, siswa dikategorikan ke dalam berbagai tahap pendidikan, termasuk ibtidaiah, tsanawiyah, dan aliah, berdasarkan pengetahuan dasar mereka.
- 3) Kurikulum telah diperkaya dengan banyak kursus, termasuk topik umum, serta berbagai peluang pendidikan lainnya, seperti pengembangan keterampilan, kepanduan, atletik, seni, dan pendidikan organisasi.
- 4) Menempatkan penekanan yang sama pada pelajaran keterampilan dengan pelajaran agama. Keterampilan dirancang untuk membekali siswa dengan kemampuan yang diperlukan untuk berkembang dalam kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan mereka di pesantren. Keterampilan yang diberikan meliputi pertanian, pertukangan, peternakan, dan disiplin terkait lainnya.
- 5) Pola kelima berfokus terutama pada pengajaran teks-teks klasik dan menggabungkan pendidikan gaya madrasah di pesantren, di mana mata pelajaran agama dan umum diajarkan. Kurikulum madrasah pondok terbagi menjadi dua bagian, yaitu kurikulum internal yang disusun oleh pondok itu sendiri dan kurikulum eksternal yang ditetapkan oleh pemerintah (Prasodjo 1982).

2. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Masa Orde Lama

Setelah mencapai kemerdekaan Indonesia, pemerintah secara progresif memprioritaskan keberlanjutan pendidikan agama Islam. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami proses sejarah yang panjang, mulai dari abad ke-20 Masehi hingga saat ini. Perkembangan ini dikategorikan ke dalam tiga periode yang berbeda: orde lama, orde baru, dan periode pasca-reformasi. Setelah kemerdekaan, yang biasa disebut sebagai orde lama, Pendidikan Islam mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan berdirinya kementerian agama, yang sebelumnya dikenal sebagai departemen agama, yang secara resmi didirikan pada tanggal 3 Januari 1946 (Dhaifi 2018).

Kurikulum pendidikan agama Islam pada era orde lama dibagi menjadi 2 yaitu: kurikulum 1947 (Rencana Pelajaran) dan kurikulum 1952 (Rencana Pelajaran Terurai).

1) Kurikulum 1947

Kurikulum perdana yang dikembangkan setelah Indonesia merdeka adalah kurikulum 1947. Kurikulum ini secara alternatif disebut sebagai rencana pelajaran atau, dalam bahasa Belanda, sebagai "leer Plan" (Wahyuni 2015). Tahun ini, kurikulum pendidikan agama belum beroperasi dengan efisiensi maksimal. Kurikulum dari tahun 1947 masih mencerminkan pengaruh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Kecurigaan ini muncul karena fakta bahwa Indonesia baru saja memperoleh kemerdekaan dan secara aktif terlibat dalam tugas mengatur dan mencari kerangka pendidikan yang optimal.

Saat ini, pendidikan sangat mementingkan pendidikan karakter, khususnya berfokus pada menanamkan rasa nasionalisme yang kuat. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan loyalitas terhadap

bangsa dan negara di antara penduduk.

Rencana pelajaran tahun 1947, kadang-kadang disebut sebagai kurikulum 1950, mencakup enam belas disiplin ilmu, khususnya di wilayah Sunda, Jawa, dan Madura, di mana mata pelajaran bahasa daerah diajarkan di tingkat sekolah rakyat. Kurikulum mencakup berbagai kursus, termasuk menulis, aritmatika, seni suara, keterampilan tangan, bahasa Indonesia, ilmu alam, ilmu kehidupan, berhitung, ilmu bumi, ilmu sejarah, kebersihan dan kesehatan, pendidikan etika, dan pendidikan agama. Sesuai wahyu, mata pelajaran agama secara eksklusif diajarkan dari kelas 1 pada tahun 1951, meskipun pada tahun sebelumnya, mereka hanya diperkenalkan di kelas empat dan lebih tinggi (Wahyuni 2015).

Rencana pelajaran 1947 dapat dianggap sebagai pengganti sistem kolonial Belanda. Karena semangat nasionalistik yang berlaku selama periode itu, pendidikan dipandang sebagai sarana untuk menumbuhkan kesesuaian dan membentuk karakter bangsa Indonesia untuk mandiri, berdaulat, dan setara dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia.

2) Kurikulum 1952

Mengikuti rencana pelajaran tahun 1947, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan pada tahun 1952. Acara yang diadakan pada tahun 1952 ditetapkan sebagai pertemuan Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini telah menghasilkan pembentukan sistem pendidikan nasional. Aspek yang menonjol dan atribut simultan dari kurikulum 1952 adalah bahwa setiap rencana pelajaran harus memprioritaskan dimasukkannya konten yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum 1952 dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan kurikulum sebelumnya. Frasa lain yang biasa digunakan untuk merujuk pada kurikulum ini adalah rencana pelajaran yang disempurnakan tahun 1952. Pada tahun 1951, dua menteri (Menteri PP&K dan Menteri Agama) mengeluarkan surat keputusan yang menguraikan peraturan penyelenggaraan pendidikan agama Islam. Keputusan ini menyoroti bahwa materi agama Islam harus diajarkan di sekolah umum selama minimal dua jam setiap minggu. Pendidikan agama Islam kini sedang diintegrasikan ke dalam lembaga pendidikan formal di hari ini.

3. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, kurikulum pendidikan agama terutama difokuskan pada penyempurnaan kurikulum yang sudah ada. Ini melibatkan pembangunan kurikulum yang dikembangkan selama periode orde lama, khususnya antara tahun 1947 dan 1952. Kurikulum ini disempurnakan lebih lanjut selama masa Orde Baru dengan diperkenalkannya kurikulum 1962, 1968, 1975, 1984 (juga dikenal sebagai kurikulum CBSA), suplemen kurikulum 1994, dan 1999. Kurikulum PAI berkembang terus menerus dari waktu ke waktu, menggabungkan unsur-unsur dari beberapa jenis kurikulum.

1) Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 dapat dianggap sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1964. Setelah kemerdekaan, kurikulum ini telah berkembang menjadi paradigma kurikuler terintegrasi. Kurikulum saat ini tidak lagi memprioritaskan pancawardhana seperti yang terjadi pada tahun 1964. Namun demikian, pelaksanaan strategi pendidikan agama berbeda dengan kurikulum yang ditetapkan pada tahun 1964.

2) Kurikulum 1975

Kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pendidikan, khususnya berfokus pada kegiatan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Kata "unit pembelajaran" atau "perencanaan pembelajaran" telah menjadi lazim di zaman kontemporer, mengacu pada organisasi dan struktur diskusi pendidikan (Nurhasanah and Sukino 2022). Kurikulum 1975 menyaksikan transformasi substansial dalam pendidikan agama Islam. Pada tahun 1975, SKB 3 menteri (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri P&K) menetapkan kurikulum madrasah. Pendidikan agama Islam dialokasikan 30% dari kurikulum, sedangkan pendidikan umum menerima 70%. Untuk mencapai kesetaraan antara ijazah madrasah dan ijazah dari sekolah umum, sangat penting untuk memastikan bahwa siswa madrasah yang ingin pindah ke sekolah umum diakui dan diizinkan untuk melakukannya. Keadaan ini terbukti sepanjang periode sebelum penerapan kurikulum 1975.

3) Kurikulum 1984

Kurikulum ini menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif dalam observasi, yang merupakan penyempurnaan yang baik dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum, dilaksanakan pada tahun 1984, tidak hanya mencakup tindakan mengamati tetapi juga tindakan mengkategorikan, berkomunikasi, dan mendokumentasikan. Kurikulum ini mencakup banyak model pembelajaran, seperti Metode Pembelajaran Siswa Aktif (CBSA), di mana guru bertindak sebagai fasilitator, memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Metode pengajaran konvensional yang diadopsi oleh pendidik secara bertahap menurun mendukung pendekatan pembelajaran ini.

Dalam kurikulum ini, pendidikan agama dialokasikan proporsi yang setara seperti pada kurikulum sebelumnya. Namun demikian, Keputusan Menteri 2 memberikan validasi bahwa lulusan dari madrasah memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan di sekolah umum. Ini menghilangkan keraguan apa pun yang mungkin dimiliki orang tua dalam mengirim anak-anak mereka ke madrasah. Kurikulum 1984 memasukkan unsurunsur strategis seperti pelaksanaan program kegiatan kurikulum madrasah (MI, MTs, dan MA). Program ini mencakup kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, yang ditawarkan dalam program inti dan opsional. (2)

Proses belajar mengajar dilakukan dengan memastikan keselarasan yang harmonis antara gaya belajar individu dengan konten yang diajarkan. (3) Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, serta pengelolaan program.

4) Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Kurikulum ini tidak berasal dari bentuknya saat ini; Sebaliknya, ini adalah hasil dari upaya untuk memasukkan kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Termasuk dalam daftar adalah kurikulum dari tahun 1975 dan kurikulum dari tahun 1984. Munculnya UU SISDIKNAS No. 02 Tahun 1989 memperkenalkan definisi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang bercirikan pendekatan Islam. Ini tidak berasal secara spontan, melainkan dibuat dengan cermat di masa lalu.

Pada tahun 1994, peraturan yang mewajibkan dimasukkannya kurikulum pendidikan agama diberlakukan di semua tingkat sekolah, menjadikannya mata pelajaran wajib dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Di tingkat dasar, ada total sembilan topik, yang mencakup pendidikan agama juga. Di tingkat sekolah menengah pertama, pendidikan agama diintegrasikan ke dalam kelompok program pendidikan umum. Demikian pula, pendidikan agama dikategorikan bersama PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional, dan Sejarah Umum sebagai bagian dari kurikulum pengajaran umum di tingkat sekolah menengah. Mata kuliah yang ditawarkan meliputi Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika, IPA (Biologi, Kimia, dan Fisika), IPS (Sosiologi, Geografi, dan Ekonomi), dan Pendidikan Seni. Kurikulum 1994 untuk pendidikan agama hanyalah perbaikan, dengan tidak berdampak pada durasi pelajaran atau hakikat /isi pengajaran agama untuk siswa (RI 2021).

4. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Masa Reformasi

Transisi dalam kepemimpinan telah mempengaruhi modifikasi kebijakan di bidang pendidikan, menghasilkan perubahan yang sesuai dengan kurikulum. Masa reformasi yang menekankan pada keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas memang berdampak pada ranah pendidikan nasional. Kurikulum sepanjang era reformasi telah mengalami beberapa modifikasi, yang meliputi:

1) Kurikulum KBK

Era reformasi telah memberi kita peluang signifikan untuk mengembangkan kebijakan pendidikan baru yang transformatif dan inovatif. Tujuan dari usia ini adalah untuk mencapai masyarakat Indonesia yang berdaya saing tinggi, berteknologi maju, dan makmur secara ekonomi di bawah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Mulyasa 2003). Salah satu konsekuensi dari cepatnya reformasi tersebut adalah terbentuknya sistem kurikulum berbasis kompetensi yang

biasa disebut dengan kurikulum KBK.

Untuk memperkuat hal tersebut di atas, pemerintah kemudian menerapkan UU No. 20 tahun 2003, yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional dan menggantikan UU No. 2 tahun 1989. Sejak itu, pendidikan telah didefinisikan sebagai upaya yang disengaja dan terorganisir untuk membangun lingkungan yang kondusif untuk belajar dan memfasilitasi proses pembelajaran di mana siswa secara aktif menumbuhkan kemampuan bawaan mereka untuk memiliki ketabahan agama dan spiritual, disiplin diri, individualitas, kecerdasan, karakter berbudi luhur, dan bakat yang diperlukan untuk kebutuhan pribadi, sosial, nasional, dan pemerintah mereka. KBK menunjukkan beberapa atribut utama:

- a. Berfokus pada pencapaian kemahiran siswa daripada hanya menyelesaikan konten.
- b. Kurikulum dapat ditingkatkan, diperkaya, dan disesuaikan untuk mengakomodasi berbagai kemampuan siswa (rata-rata, di atas rata-rata, dan luar biasa).
- c. Berpusat pada siswa
- d. Orientasi pada proses dan hasil
- e. Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual
- f. Guru bukan satu-satunya sumber belajar
- g. Belajar sepanjang hayat
- h. Belajar mengetahui (learning how to know)
- i. Belajar melakukan (learning how to do)
- j. Belajar menjadi diri sendiri (learning how to live together)

Pendekatan belajar mengajar yang digunakan dalam KBM-nya terutama difokuskan pada pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), yang meliputi konstruktivisme, pembelajaran berbasis inkuiri, teknik bertanya, pembelajaran berbasis masyarakat, pemodelan, refleksi, dan penilaian otentik.

Pengenalan kurikulum 2004 memiliki konsekuensi yang signifikan bagi penyelenggaraan pendidikan agama Islam. Hal ini juga menekankan pentingnya kompetensi dalam pendidikan madrasah. Terlepas dari model atau formatnya, sangat penting untuk mengakui bahwa kehadiran kurikulum merupakan komponen penting dalam bidang pendidikan. Tidak adanya kurikulum menimbulkan tantangan dalam menerjemahkan dan mencapai tujuan pendidikan secara efektif (Suhartono 2011).

2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006

Tahun 2006 menandai implementasi kurikulum 2004. Justifikasi penciptaan kurikulum 2006 atau dikenal juga dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) didasarkan pada implementasi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Undang-undang ini kemudian diperluas dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003, yang membahas standar nasional pendidikan (PP no. 19 tahun 2005 tentang SNP).

PP No. 19 Tahun 2005 yang berkaitan dengan Ujian Nasional Sekolah (SNP) tidak mencantumkan acuan kurikulum nasional. Sebaliknya, ia menguraikan implementasi KTSP, kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan di setiap lembaga pendidikan. Implikasinya adalah perlunya penyempurnaan kurikulum 2004, yang selanjutnya dikenal dengan kurikulum 2006 (KTSP).

Karakteristik utama KTSP adalah pemberian otonomi kepada sekolah dalam merumuskan kebijakan sekolah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan, sementara juga mengakomodasi preferensi masyarakat setempat. Pendekatan ini mendorong kolaborasi yang kuat antara sekolah, masyarakat, industri, dan pemerintah untuk membentuk karakter siswa. Selain itu, atribut khasnya memerlukan metode pengajaran alternatif dan memerlukan tingkat kesatuan yang tinggi di antara anggota tim (Ceo 2018).

Dalam kurikulum ini, sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan silabus pendidikan yang selaras dengan minat siswa dan kebutuhan lingkungan. KTSP mengutamakan fokus pada pendidikan lokal. Untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan di sekolah sesuai dengan standar nasional, Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Peraturan ini menguraikan kerangka dasar dan struktur kurikulum, jumlah konten yang akan dibahas, kalender akademik, serta standar kompetensi dan keterampilan penting yang harus diperoleh siswa. Untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di bawah yurisdiksi departemen agama tidak terbengkalai, menteri agama juga telah mengeluarkan surat keputusan, yaitu menteri agama no. 2 tahun 2008, yang menguraikan standar kompetensi lulusan dan kriteria penilaian untuk konten pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di Madrasah.

3) Kurikulum 2013 (K13)

Pendidikan berfungsi lebih dari sekedar sarana untuk memperoleh pengetahuan. Pada dasarnya, pendidikan berfungsi sebagai platform bagi individu untuk sepenuhnya menemukan dan mengembangkan kemampuan bawaan mereka. Dengan demikian, dengan menerapkan kurikulum 2013, sistem pendidikan bertujuan untuk sepenuhnya memanfaatkan kemampuan siswa, meliputi prestasi akademik maupun non-akademik mereka.

Kurikulum 2013 diturunkan dari kurikulum 2006 (KTSP), yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kesulitan masa depan, perspektif masyarakat, kemajuan pengetahuan, pedagogi, kompetensi masa depan, dan fenomena negatif. Kurikulum 2013 dirancang untuk menumbuhkan keterampilan spiritual, sosial, kognitif, dan praktis siswa, memungkinkan

mereka untuk menggunakan pembelajaran mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka. Siswa akan memanfaatkan pengetahuan yang mereka peroleh melalui pengalaman belajar di lingkungan sekolah dan masyarakat yang berbeda. Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas hubungan antara mata pelajaran, serta mempromosikan pertumbuhan dan pengayaan pengetahuan di berbagai tingkat pendidikan.

Pemerintah mengamanatkan peraturan Menteri Agama RI tentang kurikulum madrasah 2013 untuk topik PAI dan bahasa Arab untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pendidikan nasional dan menjaga kontrol atas kualitas prestasi pendidikan. Kurikulum 2013 menempatkan penekanan yang signifikan pada prinsip-prinsip agama, tidak hanya dalam topik PAI tetapi juga dimasukkan di semua mata pelajaran. Faktor pembeda PAI dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan tematik integratifnya. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada peningkatan moralitas dan karakter siswa melalui pembelajaran PAI. Ini melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan ritual ibadah, bergerak melampaui instruksi tekstual dogmatis belaka.

4) Kurikulum Merdeka

Kurikulum memegang kepentingan yang signifikan dalam bidang pendidikan. Kurikulum yang tidak memadai dapat menghambat siswa untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Secara alami, semua aspek disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik siswa di wilayah geografis khusus mereka. Kurikulum merdeka tersebut secara resmi diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Riset dan Teknologi pada Februari 2022. Kurikulum independen adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada memelihara keterampilan dan melayani kepentingan individu. Siswa memiliki kebebasan untuk memilih pelajaran yang ingin mereka pelajari berdasarkan minat dan antusiasme pribadi mereka.

Kurikulum merdeka adalah program pembelajaran intrakurikuler bervariasi yang menawarkan siswa banyak kesempatan untuk menyelidiki konsep dan meningkatkan kompetensi mereka, menghasilkan pengalaman belajar yang optimal. Guru memiliki otonomi untuk memilih beragam alat instruksional untuk menyesuaikan pembelajaran dengan persyaratan dan minat belajar khusus siswa.

Pengembangan kurikulum ini, yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian profil siswa Pancasila, didasarkan pada tema-tema khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak memiliki fokus yang jelas untuk mencapai hasil pembelajaran yang telah ditentukan, sehingga tidak terkait erat dengan konten khusus subjek (Baruta 2023).

Kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa modifikasi dan penyempurnaan, dimulai dengan adopsi kurikulum tiga belas, juga dikenal sebagai K13. Pada tahun 2018, direvisi dan menjadi tiga belas

kurikulum yang direvisi. Karena dampak pandemi Covid-19, diubah menjadi kurikulum darurat. Selanjutnya, disempurnakan lagi menjadi kurikulum merdeka belajar (Ozar 2018). Revisi kurikulum ini diantisipasi untuk secara efektif mengatasi beragam tantangan pendidikan yang dihadapi oleh penduduk Indonesia. Penurunan ekonomi dan kemajuan yang tertunda akibat pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan kejatuhan suatu bangsa. Hal ini sangat memprihatinkan bagi negara seperti Indonesia, yang memiliki dividen demografis yang signifikan dan sangat bergantung pada sumber daya manusianya. Salah satu pendekatan yang efektif untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurut Pusmenjar dalam (Baruta 2023) ada beberapa tujuan kurikulum merdeka yaitu:

1. Menciptakan Pendidikan yang Menyenangkan

Tujuan utama dari kurikulum merdeka adalah untuk membangun pengalaman pendidikan yang menyenangkan dan memperkaya bagi siswa dan guru. Kurikulum ini mengutamakan penanaman bakat dan karakter yang sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia.

2. Mengejar ketertinggalan Pembelajaran

Salah satu tujuan kurikulum merdeka adalah untuk mengurangi kehilangan pembelajaran akibat epidemi COVID-19. Kurikulum ini dirancang dengan tujuan untuk meniru sistem pendidikan negara-negara industri di Indonesia. Ini berusaha untuk memberikan siswa dengan otonomi untuk memilih mata pelajaran yang selaras dengan kepentingan pribadi mereka.

3. Mengembangkan Potensi Peserta Didik

Kurikulum ini dirancang agar efisien dan mudah beradaptasi, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih komprehensif. Selanjutnya, kurikulum merdeka memprioritaskan konten mendasar dan pengembangan kemahiran siswa di seluruh tahapannya.

Kurikulum ini dirancang agar efisien dan mudah beradaptasi, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih komprehensif. Selanjutnya, kurikulum merdeka memprioritaskan konten mendasar dan pengembangan kemahiran siswa di seluruh tahapannya.

Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, murid di setiap satuan pendidikan berhak menerima Pendidikan Agama Islam. Istilah "pendidikan agama" disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007, yang secara khusus membahas topik pendidikan agama. Kehadiran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kokoh kokoh di atas landasan konstitusional ini. Oleh karena itu, dari sudut pandang operasional, sangat penting untuk secara hati-hati mengevaluasi dan sepenuhnya menerapkan masalah Pendidikan Agama Islam. Siswa yang memperoleh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pasti memiliki pengetahuan dan sikap yang selaras dengan tujuan kurikulum "Merdeka Belajar". Mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam memainkan peran penting dalam upaya untuk menumbuhkan nilai-nilai moral dan menumbuhkan identitas nasional.

Tujuan pendidikan agama Islam tidak hanya untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk sikap, mengembangkan kepribadian, dan menumbuhkan kemampuan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan setiap siswa. Untuk membina peserta didik mandiri, sangat penting untuk aktif menekuni kegiatan pembelajaran di Pendidikan Agama Islam. Perolehan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan kemampuan untuk menjalankan otonomi baik di ruang kelas maupun masyarakat (Asfiati 2020).

Problematika Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi banyak bagian kehidupan, termasuk terjadinya pergeseran peran sekolah sebagai lembaga pendidikan. Beban pendidikan menjadi lebih berat dan rumit karena berbagai jenis kebutuhan hidup berkembang. Sekolah dituntut tidak hanya untuk dapat membekali berbagai jenis ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, tetapi juga untuk dapat mengembangkan minat dan bakat, membentuk moral dan kepribadian, bahkan agar siswa dapat menguasai berbagai macam keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi dunia kerja (Sanjaya 2008).

Transformasi yang cepat ini menempatkan tanggung jawab pada pengembang kurikulum, yang harus berhati-hati memilih dan menentukan konten yang akan diajarkan kepada individu tertentu.

Salah satu prinsip dasar kurikulum adalah konsep relevansi, yang dipahami sebagai kesesuaian kurikulum dengan keadaan dan kebutuhan saat ini. Kurikulum pendidikan Islam juga harus menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang akan segera berdampak pada struktur dan perspektif keberadaan manusia, yang mencakup hal-hal duniawi dan spritual (Thoah 1996).

Oleh karena itu, sangat penting bagi pendidikan Islam untuk berakar kuat dan disesuaikan dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan agama, tanpa mengorbankan ajaran dasar Islam.

Berdasarkan kajian dari berbagai bidang dan metodologi, tampak bahwa penurunan moral masyarakat Indonesia dan krisis multidimensi yang mereka hadapi saat ini dapat dikaitkan dengan keyakinan umum bahwa semua jenis krisis berasal dari masalah moral atau etika. Krisis ini saat ini terjadi sebagai akibat dari tidak memadainya pengajaran agama secara sementara, yaitu dalam konteks Pendidikan Islam (Muhaimin 2003).

Ketika mengevaluasi keberhasilan pendidikan agama, ada tiga indikator utama: transmisi pengetahuan yang sukses, transmisi nilai, dan transmisi keterampilan. Segmen awal berkaitan dengan pemahaman kognitif. Bagian kedua berkaitan dengan perbedaan antara nilai-nilai positif dan negatif, mendesak peserta didik untuk merangkul nilai-nilai baik dan membenci nilai-nilai tidak bermoral. Bagian ketiga berfokus pada tindakan dan perilaku praktis.

Perbedaan antara persepsi efektivitas pendidikan Islam dan bukti empiris aktual menyoroti masalah mendasar atau tantangan dalam bidang pendidikan

Islam. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Pulsitbang Agama dan Agama (2010) mengidentifikasi beberapa masalah mendasar dengan kurikulum Lembaga Pendidikan Islam (madrasah) dalam kaitannya dengan reposisi madrasah dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003. Masalah-masalah ini meliputi:

1. Komponen Tujuan

Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mengaktualisasikan ajaran Islam dan menumbuhkan individu yang berpengetahuan dan berhasil dalam ketaatannya pada prinsip-prinsip Islam, serta untuk menumbuhkan lingkungan pendidikan yang mewujudkan penguasaan ilmu-ilmu agama. Pergeseran madrasah dari lembaga khusus yang terutama menekankan studi agama menuju model pendidikan yang lebih inklusif mirip dengan sekolah konvensional menunjukkan promosi integrasi mereka ke dalam lembaga pendidikan arus utama sambil mempertahankan identitas Islam mereka. Kurikulum madrasah sejalan dengan sekolah, meskipun tetap mempertahankan identitas Islamnya dengan memasukkan mata pelajaran agama, meskipun dengan intensitas dan kedalaman yang kurang dibandingkan dengan pendirian awalnya (Akhmad 2010). Sebagai konsekuensi dari perubahan ini, fokus madrasah pada studi agama berkurang dan penekanan pada mata pelajaran umum meningkat. Kecenderungan ini sering mengarahkan siswa madrasah untuk mengedepankan pengejaran sekuler dan materialistis di atas penguasaan ilmu-ilmu agama.

2. Komponen Materi (Isi dan Struktur Program)

Kurikulum madrasah dirancang dengan cermat untuk tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam tentang studi agama, tetapi juga untuk mengeksplorasi secara menyeluruh berbagai mata pelajaran umum. Akibatnya, lulusan madrasah memiliki keunggulan tersendiri karena mereka diyakini mampu unggul dalam berbagai bidang, meliputi dimensi intelektual, moral, spiritual, dan ilmiah modern secara bersamaan. Masalah yang diidentifikasi di lapangan adalah:

- a. Materi pendidikan di madrasah dianggap kurang menumbuhkan pola pikir kritis, hanya berfokus pada masalah agama dan mengabaikan kemajuan bidang yang lebih luas seperti ilmu sosial dan alam.
- b. Kurikulum madrasah terlalu terbebani karena dimasukkannya pelajaran umum (70%) di tambah dengan pelajaran agama (30%), yang merupakan ciri khas lembaga pendidikan Islam.
- c. Kurikulum pendidikan, dipandang sebagai entitas nyata, tetap penuh dengan beberapa ambiguitas. Hal ini terbukti dalam kenyataan bahwa SD, SMP, dan SMA memiliki kurikulum yang terlalu dibebani dengan banyak mata pelajaran. Konsekuensinya adalah bahwa penyerapan siswa kurang optimal, menunjukkan bahwa siswa memperoleh pengetahuan secara dangkal, kurang penguasaan dan kemahiran dalam kemampuan esensial (Sanaky 2003).
- d. Memang, proses pendidikan Islam relatif biasa-biasa saja ketika datang ke materi dan metode yang digunakan. Kurikulum pendidikan Islam terutama

berfokus pada isu-isu normatif, ritual, dan eskatologis. Materi pendidikan disampaikan dengan penekanan kuat pada ortodoksi agama dalam pelajaran agama yang menekankan iman daripada aspek ortopraksik, yang melibatkan aplikasi praktis iman dalam tindakan nyata.

3. Komponen Strategi

Menerapkan kurikulum pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan memerlukan pembelajaran aktif dengan pendekatan yang berpusat pada siswa untuk menumbuhkan potensi mereka. Namun, permasalahan yang terjadi di lapangan adalah:

- a. Kegiatan belajar mengajar di madrasah terutama mencakup komunikasi satu arah, dengan guru memegang posisi dominan. Siswa cenderung pasif dan kurang kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau menumbuhkan wawasan intelektual.
- b. Fokus yang lebih besar pada elemen kognitif dibandingkan dengan aspek afektif dan psikomotorik. Setelah memeriksa desain program kurikulum pendidikan Islam di berbagai tingkatan, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, menjadi jelas bahwa ia gagal mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan. Hal ini disebabkan penekanan kurikulum yang berlebihan pada aspek tekstual, mengutamakan hafalan teks agama. Lebih jauh lagi, ini baru dalam hal elemen kognitif mendasar.
- c. Kurikulum pendidikan Islam terus didominasi mematuhi prinsip-prinsip normatif. Pendidikan Islam terkadang tidak memiliki representasi konteks sosial-budaya, yang menghalangi siswa untuk memahami nilai-nilai agama yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari mereka.

4. Komponen Evaluasi

Penilaian merupakan komponen dari kerangka KTSP yang saat ini sedang diterapkan di semua lembaga pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk mencapai keseimbangan di tiga domain: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini dicapai melalui pemanfaatan beragam alat, bentuk, sistem, dan model penilaian, yang dilaksanakan secara terus menerus untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang prestasi dan kemajuan siswa dalam hasil belajar (Mulyadi 2010). Dalam praktiknya, penilaian hasil belajar di lapangan cenderung berfokus pada penilaian individu yang mengedepankan aspek kognitif. Penilaian ini biasanya mengambil bentuk pertanyaan ujian agama Islam, yang terutama menekankan aspek kognitif. Namun, mereka jarang memasukkan pertanyaan yang menilai pentingnya "nilai-nilai" spiritual religius fungsional dan "makna" dalam kehidupan sehari-hari.

5. Status Lembaga Pendidikan

Madrasah, sebagai sub sistem pendidikan nasional, wajib mematuhi PP No. 19 Tahun 2005 yang menguraikan standar nasional pendidikan (SPN). Peraturan ini berfungsi sebagai landasan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan (pasal 3). Tujuan utamanya adalah untuk menjamin

kualitas pendidikan nasional, mendorong pembangunan bangsa dan menumbuhkan karakter dan peradaban masyarakat yang dihormati (pasal 4). Memenuhi persyaratan untuk madrasah adalah tugas yang kompleks, mengingat 90% dari lembaga-lembaga ini dikelola secara pribadi dan memiliki berbagai tingkat kualifikasi di berbagai bidang. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya sumber daya dan infrastruktur yang tersedia untuk madrasah.

KESIMPULAN

Secara historis, pendidikan Islam masih banyak diselenggarakan oleh institusi masjid maupun pesantren. Kurikulum PAI sejalan dengan perkembangan kurikulum pendidikan nasional. Periode tersebut meliputi Kurikulum PAI pada masa pra-kemerdekaan, Kurikulum PAI pada masa orde lama (Kurikulum 1947 dan Kurikulum 1952-1964), dan Kurikulum PAI pada masa Orde Baru (Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, dan Tambahan 1999). Kurikulum PAI selama masa reformasi meliputi Kurikulum KBK, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau kurikulum 2006, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka. Kurikulum pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami transformasi substansial, bergeser dari penekanan utama pada unsur-unsur agama dan menghafal teks ke integrasi yang lebih komprehensif dengan pengetahuan ilmiah yang luas. Perkembangan ini menandakan upaya untuk menegakkan keseimbangan antara pengajaran agama dan pengajaran komprehensif, sementara juga memodifikasi pendidikan Islam agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan persyaratan kontemporer. Untuk meringkas, perkembangan ini mencontohkan sifat pendidikan Islam yang rumit dan beragam di Indonesia.

Secara keseluruhan, problematika dalam kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia mencakup pergeseran fokus tujuan pendidikan, kurangnya pengembangan pemikiran kritis, kurangnya pembelajaran aktif, kurangnya representasi konteks sosial-budaya, penilaian yang terlalu kognitif, dan kesulitan memenuhi standar nasional pendidikan. Reformasi mendalam diperlukan untuk memastikan relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman, mempertahankan identitas Islam tanpa mengorbankan esensi ajaran, dan meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam guna memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjawab krisis moral yang dihadapi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Nunu. 2010. *Pendidikan Agama Di Indonesia: Gagasan Dan Realita*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Akhyar, Aidil, and Mohamad Erihadiana. 2021. "Teacher'S Effort in the Development of Islamic Religious Education Curriculum in Sma Negeri 1 Kerinci." *Ta Dib : Jurnal Pendidikan Islam* 10 (2): 353–60. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v10i2.7582>.
- Ali, Hasan. 2003. *Kapita Selektta Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asfiati. 2020. *Visualisasi Dan Virtualisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Versi Program Merdeka Belajar Dalam Tiga Era (REvolusi Industri 5.0, Era Pandemi Covid-19, Dan Era New Normal)*. Edited by Ihwanuddin Pulungan. Jakarta: Kencana.
- Azizah, Riawati. 2022. "Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Implementasi Pembelajaran PAI Siswa Madrasah Diniyah Nurul Huda Pasuruan." *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7 (01): 01–15. <https://doi.org/10.26618/jtw.v7i01.4742>.
- Baruta, Yusuf. 2023. *Asesmen Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah*. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indoensia.
- Ceo, Coan. 2018. "Makalah Perkembangan Kurikulum Madrasah/Sekolah Masa Reformasi." Blogspot.Com. 2018. <https://makalahkampus15.blogspot.com/search?q=kurikulum+madrasah>.
- Dhaifi, Ahmad. 2018. "Perkembangan Kurikulum Pai Di Indonesia." *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1 (2): 76–88. <https://doi.org/10.33650/edureligia.vi12.47>.
- Muhaimin. 2003. *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi-Pengetahuan*. Bandung: Nuansa.
- Mulyadi. 2010. *Evaluasi Pendidikan; Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Agama Di Sekolah*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Mulyasa, E. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nata, Abuddin. 2003. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Edited by Angkasa. Cet 1. Bandung.
- Nurhasanah, and Arief Sukino. 2022. "Perkembangan Dan Problematika Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Pai) Di Indonesia Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8 (2): 142–55. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1517>.
- Ozar, T. D. 2018. "Identifying Learning Objectives and Assessing Ethics Across the Curriculum Programs. In Ethics Across the Curriculum-Pedagogical Perspectives." Springer International Publishing, 55–71. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78939-2_4.
- Prasodjo, Sudjoko. 1982. *Profil Pesantren Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al-Falak Dan Delapan Pesantren Lain Di Bogor*. Jakarta: LP3ES,.
- RI, Kemenag. 2021. "SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DAN ORGANISASI DITJEN PENDIDIKAN ISLAM." From Dirjen Pendis Kemenag RI. 2021. <https://pendis.kemenag.go.id/profil/sejarah>.
- Ritonga, M. 2018. "Politik Dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Hingga Masa Reformasi." *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 5(2): 88–102. <http://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/pgsd/article/view/212>.
- Sanaky, Hujair AH. 2003. *Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Safira insinia Press.

- Sanjaya, Wina. 2008. *Kurikulum Dan Pembelajaran: Teori Dan Praktik Pengembangan KTSP*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setiawati. 2022. "Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum Terhadap Pembelajaran Di Sekolah." *Nizamul Ilmi : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7 (1): 1-7.
- Suhartono, Toto. 2011. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Ar Ruzz Media.
- Thoha, Chabib. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wahyuni. 2015. "Kurikulum Dari Masa Ke Masa." *Al-Adabiyah* 10 (2): 234.